

PERUBAHAN FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KAWASAN WISATA, FAKTOR PENYEBAB DAN STRATEGI PENANGGULANGANNYA

Changes in the Function of Agricultural Land in Tourist Areas, Causes and Strategy for Mitigation

I Ketut Sumantra¹⁾, Mohammad Dieng Mahardika, I Ketut Arnawa

¹⁾Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan
Pascasarjana Universitas Mahasaraswati Denpasar - Bali

¹⁾email : ketut.sumantra@unmas.ac.id

Abstract

Interpretation of the function of agricultural land that is unstoppable can threaten the availability of food, and in the long term can cause environmental, economic, and social losses. On the other hand, the effectiveness of the implementation of land use control instruments has not run optimally as expected. The village of Tibubeneng, North Kuta sub-district, Badung Regency was used as the object of research because the amount of agricultural land conversion was very high due to the development of tourism facilities. The research was aims to determine the change in land used for tourism activities and the factors that influence it and to find out the changes in land use and driving factors using observation and interview methods. Data on land-use change uses overlay techniques while to determine the driving factors for agricultural land change using the method Principal Component Analysis. The results showed that the biggest changes in land use for tourism activities occurred in rice fields, with a change of 40.52%. Economic factors and the availability of infrastructure are the dominant factors in changing the function of agricultural land for tourism activities. Reducing the conversion of agricultural land functions needs to be done: 1) integration of agricultural activities with the tourism sector. 2) Increase and strengthen the economic role of rural communities through the establishment of BUMDes. 3) Increase and optimize supervision and control of buildings that violate applicable regulations. 4) Designing spatial products related to controlling land-use utilization. 5) Implement a system of incentives and disincentives so that the economic interests of the population can be sustained.

Keywords: Land; Agriculture; Economy; Tourism; Environment; Control

PENDAHULUAN

Kabupaten Badung merupakan tempat kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara ke Bali tertinggi. Jumlah kunjungan wisatawan yang terus meningkat mendorong pembangunan pendukung pariwisata, hal apat dilihat dari berkurangnya lahan terbuka menjadi lahan terbangun. Pada 2017 lalu, sawah di Badung seluas 9.974,58 hektare. Tahun 2018 berkurang 34,34 hektare hingga luasnya

menjadi 9.940,24 hektare. Data terbaru 2019, luas sawah menurun 9.456,00 hektare atau berkurang 484.24 hektar (BPS Kab. Badung,2018)

Aktivitas pariwisata dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, seperti pendapatan bagi daerah, lapangan kerja (Sumantra et al., 2018; Sumantra et.al., 2017; Sumantra and Anik Yuesti 2018) dan sumber pendapatan bagi penduduk (Ruzic and Sutic, 2014; Raju et al., 2019).

Pembangunan sektor pariwisata diakui memberikan dampak positif, namun beberapa penulis menyebutkan bahwa pengembangan kawasan wisata berdampak terhadap perubahan dan kerusakan lingkungan (Ghobadi and Verdian, 2016; Göktuğ et al., 2015; Raju & Seshadri, 2019). Karenanya, dampak negatif tersebut harus diminimalisir dengan pendekatan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Ottenbacher et al., 2018).

Lahan merupakan sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat luas dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Dari sisi ekonomi lahan merupakan input tetap yang utama bagi berbagai kegiatan produksi komoditas pertanian dan non-pertanian (Iqbal, dan Sumaryanto, 2016). Penggunaan lahan ditentukan oleh faktor fisik lahan, faktor ekonomi, dan faktor kelembagaan (Barlowe, 1986), serta harga jual lahan yang tinggi (Mahardika dan Muta'ali, 2018). Selain itu, faktor kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat juga akan mempengaruhi pola penggunaan lahan (Liu, 2018); Liu, dan Yang, 2018). Gao et al., (2015) mengungkapkan bahwa enam faktor yang mempengaruhi perubahan fungsi lahan yaitu investasi asing, tenaga kerja, persaingan pemerintah, institusi, populasi, dan hubungan pekerjaan dengan perumahan. Perubahan lahan pertanian menjadi kawasan wisata mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan wisata adalah mampu penyerapan tenaga kerja, sedangkan dampak negatif adalah sering terjadi keributan dan terkikisnya norma-norma masyarakat local yang bertentangan dengan budaya lokal (Benu, dan Moniaga, 2016). Perubahan fungsi lahan dari fungsi ekologis menjadi fungsi pariwisata di Kabupaten Badung paling tinggi terjadi di Kecamatan Kuta Utara. (BPS Kabupaten Badung, 2018). Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara adalah sebuah kawasan wisata yang baru dan sedang berkembang. Kondisi ini menyebabkan perubahan fungsi lahan di daerah ini sangat tinggi. Melihat fungsi strategis yang dimiliki Desa Tibubeneng,

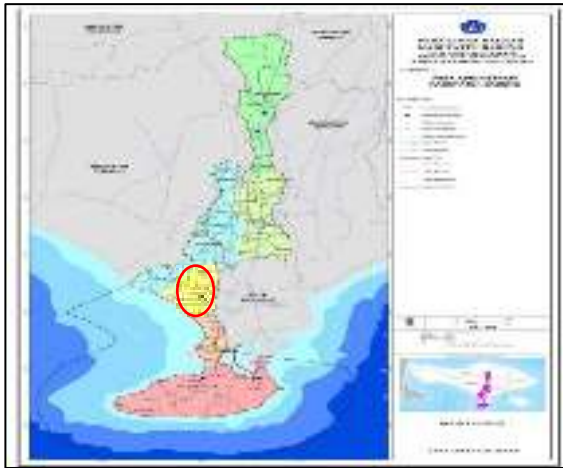
maka perlu dilakukan suatu tindakan pengendalian pemanfaatan lahan agar dapat meminimalisir terjadinya perubahan fungsi lahan. Jika alih fungsi lahan tetap terjadi dikhawatirkan menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi ketahanan pangan, lingkungan, kesempatan kerja di bidang pertanian, dan masalah sosial lainnya (Sumantra, 2017). Oleh karena itu, kebijakan pemerintah untuk mengatasinya sebaiknya lebih diarahkan dengan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan.

Masalah umum wilayah yang terjadi di Desa Tibubeneng antara lain yaitu: 1). Sebagian besar lahan-lahan produktif yang telah terlanjur dikuasai oleh investor hingga saat ini belum dikelola dan diberdayakan sesuai dengan perijinan pemanfaatan lahan; 2). Pesatnya pembangunan di area bagian Selatan Wilayah Desa Tibubeneng adalah pesatnya jumlah penduduk pendatang dikhawatirkan mempengaruhi daya dukung lingkungan daerah setempat.

Penelitian ini bertujuan mengetahui perubahan fungsi lahan pertanian dan mengetahui faktor yang mendorong pemanfaatan lahan untuk aktivitas pariwisata serta mengetahui strategi mengurangi alih fungsi lahan pertanian sehingga pembangunan sektor pertanian dan pariwisata dapat bersinergi dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, mulai bulan Maret 2018 – Juni 2018. Lokasi penelitian (Gambar 1).



Gambar 1. Desa Tibubeneng.

Aktivitas pariwisata yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pengembangan objek wisata dan sarana wisata yang berdampak pada perubahan fungsi lahan di Desa Tibubeneng. Sarana pariwisata yang dikaji meliputi : 1) sarana pokok pariwisata; 2) sarana pelengkap pariwisata dan 3) sarana penunjang pariwisata.

Metode Analisis Data

Untuk menentukan perubahan lahan menggunakan analisis pemetaan tumpang susun (*overlay peta*) dengan instrumen analisis menggunakan aplikasi GIS 10.4. dan metode analisis deskriptif. Peta fungsi lahan yang akan dianalisis adalah peta fungsi lahan pada tahun 2000 dan peta fungsi lahan eksisting tahun 2018. Untuk mendapatkan faktor pendorong terjadinya perubahan fungsi lahan dengan menggunakan analisis factor (*Principal Component Analysis*).

Adapun jenis data yang dibutuhkan meliputi data kualitatif dan data kuantitatif. Data yang dikumpulkan berupa: a) data luas lahan, b) jenis fungsi lahan eksisting, c) jenis fungsi lahan pada tahun 2000, d) peruntukan lahan, e) faktor ekonomi, f) infrastruktur desa Tibubeneng, g) Regulasi dan h) kelembagaan.

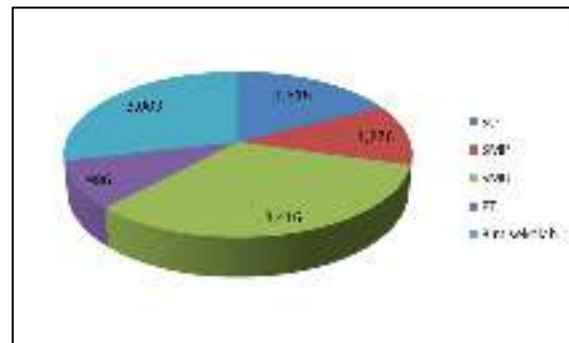
Proses mencari dan menyusun data melalui hasil observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi dijabarkan secara sistematis sehingga mudah dipahami dan selanjutnya dilakukan tahapan analisis data

dengan metode analisis deskriptif. Data dikumpulkan dengan melakukan pengamatan, wawancara, studi literatur, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum wilayah penelitian

Jumlah penduduk desa Tibubeneng pada tahun 2018 berjumlah 10.497 orang. Tingkat pendidikan masyarakat tertinggi adalah SMU yaitu 3.416 orang dengan rincian tingkat pendidikan seperti pada Gambar 2.



Gambar 2. Pendidikan penduduk desa Tibubeneng tahun 2018

Luas wilayah Desa Tibubeneng sebesar 650 ha, terbagi menjadi tiga wilayah desa adat dan tiga belas wilayah banjar dinas. Desa adat terdiri dari: Desa adat Padonan, Desa adat Tandeg dan Desa adat Berawa.

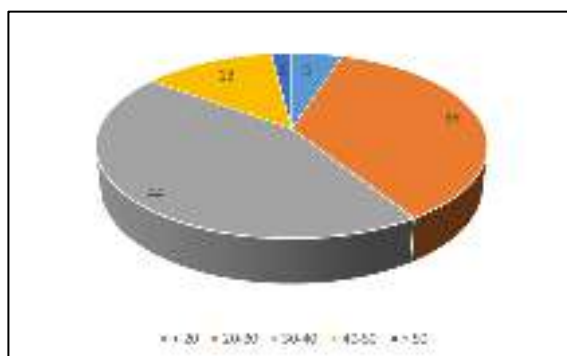
Kondisi morfologi kawasan Desa Tibubeneng berupa dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0-25 m di atas permukaan laut. Secara keseluruhan wilayah Desa Tibubeneng termasuk kedalam klasifikasi kelerengan antara 0-3%, tanah lempung, curah hujan rata-rata per tahun berkisar 2000 s/d 3000 mm, suhu rata-rata 22° - 32° C.

Karakteristik Responden

Responden penelitian berjumlah 100 orang yang merupakan penduduk Desa Tibubeneng baik yang berkecimpung

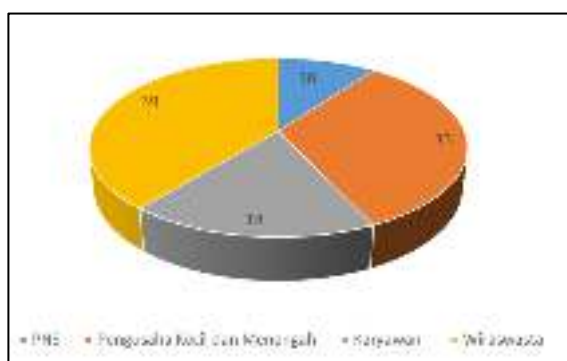
langsung dalam aktivitas pertanian, pariwisata, pegawai swasta dan PNS. Adapun karakteristik responden dapat dijelaskan sebagai berikut:

Umur responden sebagian besar (44 %) berkisar 30-40 tahun dan terendah (2 %) berumur <20 tahun (Gambar 3).



Gambar 3. Karakteristik responden berdasarkan umur

Berdasarkan pekerjaan, sebelum desa ini berkembang menjadi daerah wisata, matapencaharian penduduk adalah bertani dan nelayan. Namun karena adanya faktor-faktor yang mendorong Desa Tibubeneng menjadi kawasan wisata maka banyak penduduk yang melakukan alih profesi karena menganggap bekerja di bidang pariwisata dapat memberikan keuntungan lebih besar. Sehingga mayoritas penduduk/responden adalah sebagai karyawan swasta (Gambar 4).



Gambar 4. Mata pencaharian responden.

Perubahan fungsi lahan pertanian di desa Tibubeneng

Dari luas wilayah Desa Tibubeneng 650 Ha, kawasan persawahan terbesar

dengan luas mencapai 362 Ha, yang mencapai setengah dari luas wilayah Desa Tibubeneng. Kawasan persawahan bisa dimanfaatkan potensinya sebagai kawasan wisata alam, tempat jogging, dan kuliner. Apabila melihat potensi Desa Tibubeneng dengan alam dan iklim yang mendukung, maka pengembangan agrowisata di Desa Tibubeneng akan lebih banyak manfaatnya, disamping dapat menjual jasa dari obyek keindahan alam. Pengembangan agrowisata disamping dapat melestarikan sumber daya alam juga sebagai penghasil pangan yang dapat ditawarkan kepada wisatawan.

Pada tahun 2000 penggunaan lahan di Desa Tibubeneng didominasi oleh penggunaan lahan untuk persawahan. Fungsi lahan di Desa Tibubeneng dapat dilihat pada Tabel 1.

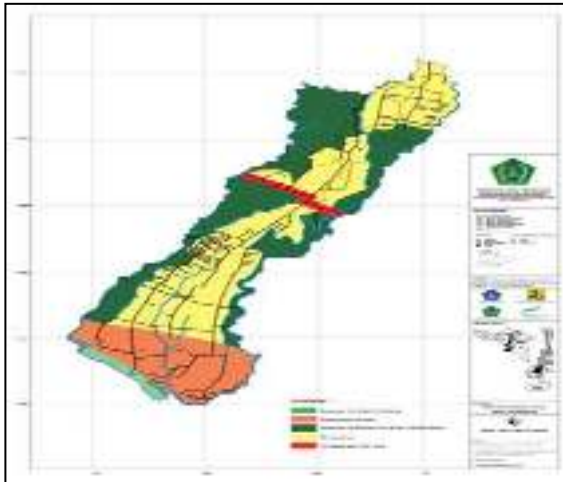
Tabel 1. Perubahan fungsi lahan di desa Tibubeneng tahun 2000 dan tahun 2018.

Fungsi lahan	Luas (ha) tahun		Besar perubahan	
	2000	2018	ha	%
Kebun	56.44	46.36	10.08	10,97
Lapangan	0.32	0.32	-	-
Permukiman	173.01	195,01	22	25,69
Sawah	420.36	362	58.36	40,52
Tanah Kosong	0.07	0.07	-	-
Sarana wisata	0	46.44	46.44	100
Total	650,2	650,2	136.88	

Sumber: Citra Satelit, 2000 dan 2018; Hasil Survey Lapangan, 2018.

Tabel 1 menunjukkan terjadi perubahan beberapa fungsi lahan di Desa Tibubeneng yang dikarenakan adanya aktivitas pariwisata. Hasil analisis juga menunjukkan beberapa fungsi lahan yang mengalami penyimpangan dari arahan tata ruang yang telah ditetapkan dalam RDTR Kecamatan. Beberapa fungsi lahan yang mengalami ketidaksesuaian tersebut, meliputi fungsi lahan sawah dan fungsi lahan kebun. Dari tahun 2000-2018 luas lahan sawah mengalami perubahan sebesar 58,36

Ha atau luasnya berkurang 40,52 %, sedangkan luas kebun terjadi penurunan sebesar 10,97 %. Fungsi lahan untuk sarana wisata menunjukkan angka yang meningkat dari luasan 0 ha pada tahun 2000 menjadi 46,44 ha di tahun 2018 (Gambar 4 dan 5).



Gambar 4. Kondisi eksiting lahan desa Tibubeneng (sumber Master Plan Kab. Badung, Kecamatan Kuta Utara).

Hal ini membuktikan bahwa kegiatan wisata di Desa Tibubeneng mengalami perkembangan, dimana pada tahun 2000 belum ditemukan sarana wisata tersebut. Penurunan luas lahan pertanian (kebun dan sawah) yang mencapai 51.49 ha pada tahun 2018 diperuntukkan pengembangan sarana wisata berupa tempat makan, restaurant, supermarket, jasa penginapan, dan fasilitas pendukung lainnya (Gambar 5).



Gambar 5. Kondisi lahan desa Tibubeneng tahun 2018

Sarana wisata dikembangkan langsung oleh penduduk Desa Adat yang juga sekaligus merupakan pemilik lahan.

Dari Gambar 6 dapat diketahui pula bahwa perubahan yang signifikan cenderung terjadi disepanjang koridor jalan utama yang pada awalnya secara dominan merupakan fungsi lahan sawah. Titik-titik fungsi lahan yang cenderung mengalami perubahan berdasarkan hasil analisis *overlay* dan yang terjadi di lapangan saat ini dapat dilihat pada Gambar 6



Sumber: Citra *Satelite Landsat* Tahun 2018
Gambar 6. Jenis Perubahan Fungsi Lahan di Desa Tibubeneng

Faktor-faktor yang mendorong perubahan lahan untuk aktivitas pariwisata

Aktivitas pariwisata yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah aktivitas pengembangan objek wisata dan sarana wisata yang ada di Desa Tibubeneng. Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya penggunaan lahan untuk aktivitas pariwisata sehingga dapat berdampak pada perubahan spasial dapat dilihat dari dorongan aspek ekonomi dan aspek sosial budaya. Aspek ekonomi dapat dikaji dengan beberapa indikator, yaitu meningkatnya pendapatan, terciptanya lapangan kerja, dan terjadinya alih profesi. Sedangkan, aspek sosial budaya dapat dilihat dari beberapa hal yaitu infrastruktur, regulasi/kebijakan, dan kelembagaan. Ketersediaan infrastruktur dapat diukur dari beberapa indikator, meliputi akses yang mudah, kelengkapan dan banyaknya variasi infrastruktur, serta keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Untuk regulasi dan kebijakan dapat dikaji dari beberapa indikator, meliputi penetapan suatu kawasan pariwisata, dan konsep pengembangan pariwisata. Sedangkan, untuk kelembagaan dapat diukur dari indikator perilaku sosial yang berkaitan dengan minat penduduk dan peran komunitas.

Hasil analisis faktor (*Principal Component Analysis*) menunjukkan bahwa dari 100 responden yang dianalisis memenuhi kecukupan data (Tabel 2).

Tabel 2. KMO dan Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		0.497
Bartlett's	Approx. Chi-Square	9.480
Test of	Df	6
Sphericity	Sig.	0.148

Tabel 2 menunjukkan nilai dari KMO dan Bartlett's test adalah 0,497 atau dibulatkan menjadi 0,5 yang artinya bahwa empat variabel yang digunakan dalam penelitian ini layak dianalisis.

Hasil analisis menunjukkan, dari empat variabel faktor pendorong perubahan fungsi lahan pertanian terbentuk dua faktor bersama (Tabel 3). Faktor bersama satu yaitu aspek ekonomi dengan persentase varian = 31.580 dan faktor bersama dua yaitu aspek infrastruktur dengan persentase varian = 28.605 serta kumulatif persentase varians dari ke-dua faktor bersama sebesar = 31.580 % dan 60.185% (Tabel 3). Aspek

Ekonomi dan aspek infrastruktur dianggap memberi sumbangan terbesar terhadap perubahan fungsi lahan karena ke dua aspek tersebut dengan nilai *initial eigenvalue total* ≥ 1 (Tabel 3).

Tabel 3. Nilai Initial Eigenvalues

Component	Total	% of Variance	Cumulative %
(Ekonomi)	1.263	31.580	31.580
(Infrastruktur)	1.144	28.605	60.185
(Kebijakan)	0.878	21.960	82.145
(Kelembagaan)	0.714	17.855	100.00

Masing-masing faktor di atas memiliki pengaruh yang mendorong penduduk setempat untuk mengembangkan aktivitas pariwisata, sehingga dapat berdampak pada perubahan fungsi lahan. Kemunculan berbagai sarana wisata di Desa Tibubeneng tidak serta merta terjadi tanpa alasan. Terlebih lagi pengembangan sarana hampir seluruhnya dilakukan oleh penduduk asli Desa Tibubeneng. Penduduk lokal memiliki alasan tersendiri yang membuat mereka memanfaatkan lahan miliknya, terutama pada fungsi kebun dan sawah untuk kemudian dikembangkan menjadi sarana wisata. Data menunjukkan usaha bidang industri kecil, menengah dan besar serta jasa dan perdagangan di desa ini menunjukkan peningkatan yang sangat tajam, disisi lain pendapatan per kapita dari sektor pertanian dan perkebunan mengalami penurunan (Tabel 4).

Tabel 4. Pendapatan Perkapita Desa Tibubeneng tahun 2000 dan 2018

No.	Sektor	Pendapatan per kapita tahun 2000	Pendapatan per kapita tahun 2018
1.	Petani dan Nelayan	Rp. 19.430.000,-	Rp. 8.000.500,-
2.	Perkebunan	Rp. 14.321.500,-	Rp. 9.070.200,-
3.	Peternakan	Rp. 17.900.200,-	Rp. 18.105.000,-
4.	Industri kecil, menengah, dan besar	Rp. 1.475.400,-	Rp. 18.437.900,-
5.	Jasa dan perdagangan	Rp. 1.052.000,-	Rp. 24.000.000,-

Sumber: Profil Desa Tibubeneng Tahun 2000 dan 2018

Berdasarkan hasil wawancara responden yang merupakan kelompok lembaga desa adat, menyebutkan bahwa industri pariwisata dapat memberikan

jaminan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan mereka sebagai petani tradisional. Terlebih lagi, beberapa tahun belakangan produksi hasil

pertanian di Desa Tibubeneng mengalami penurunan. Masyarakat setempat pun juga berpendapat bahwa kegiatan pariwisata di Desa Tibubeneng memberikan pekerjaan baru baginya. Banyak lapangan kerja yang tercipta dan mengutamakan penduduk setempat untuk bekerja di sana. Berdasarkan hasil wawancara dengan kelompok sadar wisata menyebutkan bahwa, tidak hanya meningkatnya pendapatan dan terciptanya lapangan kerja baru, aktivitas pariwisata di Desa Tibubeneng juga menyebabkan banyak penduduk yang beralih profesi karena menganggap usaha di sektor pariwisata jauh lebih menguntungkan.

Beberapa peneliti menyebutkan bahwa faktor ekonomi yang mendorong terjadinya perubahan fungsi lahan pertanian adalah: meningkatnya pendapatan penduduk; dan terciptanya lapangan kerja baru (Barlowe, 1986; Soegijoko *et al.*, 1997; dan Sari *et al.*, 2017). Sejalan dengan hasil penelitian Hastuty (2018) bahwa faktor yang mendorong petani melakukan alih fungsi lahan adalah faktor infrastruktur dan faktor ekonomi.

Aspek infrastuktur yang meliputi kemudahan aksesibilitas, kelengkapan dan kenyamanan mendorong perubahan fungsi lahan pertanian.

Infrastruktur dapat dikaji melalui indikator akses yang mudah, kelengkapan dan banyaknya variasi infrastruktur, serta keamanan dan kenyamanan lingkungan. Aksesibilitas yang terdapat di Desa Tibubeneng seperti jalan desa, jalan antar desa, jalan kabupaten, dan jalan propinsi sudah memiliki kualitas yang sangat baik. Kualitas yang dimaksud adalah menggunakan perkerasan aspal dan beton serta jembatan penghubung. Hal ini mendorong perubahan lahan pertanian sangat besar terutama perubahan fungsi lahan pertanian tersebut terjadi di jalan utama (Gambar 6). Sejalan dengan hasil penelitian Pakasi & Kumaat (2018) alih fungsi lahan terjadi karena berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan, pemukiman, tempat usaha seperti rumah makan dan infrastruktur lainnya.

Desa Tibubeneng memiliki banyak variasi infrastruktur dan lengkap. Selain prasarana transportasi, ditemukan pula prasarana komunikasi dan informasi, prasarana air bersih dan sanitasi, prasarana irigasi, prasarana pemerintahan, peribadatan, olah raga, kesehatan, pendidikan, energi dan penerangan, serta prasarana hiburan dan wisata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu lembaga adat menjelaskan bahwa, dengan kelengkapan infrastruktur yang dimiliki Desa Tibubeneng masyarakat terdorong untuk mengembangkan berbagai usaha pariwisata. Karena infrastruktur yang ada dianggap mampu menunjang berbagai mobilitas untuk perkembangan Desa Tibubeneng, khususnya di bidang pariwisata.

Adanya kebijakan menetapkan desa Tibubeneng sebagai kawasan wisata, menyebabkan masyarakat setempat untuk berperan aktif dalam mengembangkan pariwisata di Desa Tibubeneng. Hal ini dilakukan untuk memajukan nama Desa Tibubeneng sehingga menjadi lebih dikenal sebagai desa wisata. Pengembangan ini tidak bertujuan untuk merubah fungsi lahan namun tetap melestarikannya. Kebijakan ini sudah dituangkan ke dalam peraturan Desa Adat bahwa masyarakat lokal tidak diperbolehkan menjual lahan miliknya kepada orang yang bukan merupakan penduduk asli Desa Tibubeneng.

Strategi penanggulangan alih fungsi lahan

Beberapa strategi yang dapat ditawarkan untuk mengurangi alih fungsi lahan yaitu dari instrumen hukum dan Instrumen ekonomi (Sumantra, 2017):

1. Instrumen Hukum

Instrumen hukum meliputi penerbitan dan penerapan perundang-undangan dan peraturan yang mengatur mekanisme alih fungsi lahan, penataan kembali sistem dan aturan jual beli lahan serta penyempurnaan pola penguasaan lahan (*land tenure system*) dalam rangka upaya mempertahankan

keberadaan lahan pertanian. Beberapa peraturan perundangan yang sudah diterbitkan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B), dengan peraturan pendukungnya antara lain;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029;
- c. Perda 26 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Badung.

2. Instrumen Ekonomi

Instrumen ekonomi yang dimaksud adalah perangkat sistem yang dibangun untuk memberikan insentif/keuntungan ekonomi kepada petani dan para pihak yang ikutserta mempertahankan eksistensi lahan dan aktivitas pertanian melalui:

- a. Mengintegrasikan sektor pertanian dan pariwisata. Hotel dan restoran membutuhkan hasil-hasil pertanian yang sehat dan diproduksi dengan cara ramah lingkungan seperti beras, sayur dan buah organik. Disamping itu aktivitas petani yang terlibat dalam system subak dapat dijadikan atraksi yang dapat menarik wisatawan. Rumah penginapan, vila seyogyanya mampu mengintegrasikan lanskap subak dengan tanaman pangan yang ada disekelilingnya agar dapat menyatu dengan bangunan-bangunan yang ada. Sehingga sawah masih bisa lestari.
- b. Program Bersama Membangun Ekonomi Masyarakat melalui BUMDes. Semangat yang dibangun adalah memberdayakan segala potensi yang ada yang digarap secara bersama-sama oleh semua pemangku kepentingan mulai penyiapan bahan baku (hulu) hingga berada ditangan konsumen dan siap dikonsumsi (hilir). Pendekatan yang diambil

berupaya mawadahi setiap proses pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat melalui mekanisme BUMDes. BUMDes merupakan bagian dari ekonomi perdesa yang akan fokus bergerak mengembangkan produk-produk hasil pertanian, atau produk pertanian yang dapat diintegrasikan dengan sektor pariwisata.

KESIMPULAN

Perubahan fungsi lahan yang terjadi di Desa Tibubeneng dikarenakan adanya pemanfaatan untuk sarana wisata. Adapun beberapa fungsi lahan yang mengalami perubahan luasan, meliputi fungsi kawasan lindung, kebun, dan sawah. Fungsi lahan yang paling banyak mengalami perubahan fungsi adalah fungsi lahan sawah. Faktor pendorong perubahan fungsi lahan adalah faktor ekonomi penduduk dan ketersediaan infrastruktur.

Strategi yang dapat ditawarkan untuk mengurangi alih fungsi lahan adalah dari instrumen hukum melalui :

- Penerbitan dan penerapan perundang-undangan dan peraturan yang mengatur mekanisme alih fungsi lahan.
- Penataan kembali sistem dan aturan jual beli lahan serta penyempurnaan pola penguasaan lahan (*land tenure system*) dan

Instrumen ekonomi melalui:

- Mengintegrasikan sector pertanian dan pariwisata.
- Program Bersama Membangun Ekonomi Masyarakat melalui BUMDes.

Untuk mengurangi alih fungsi lahan perlu dilakukan: a) Meningkatkan dan mengoptimalkan pengawasan dan penertiban bangunan-bangunan yang melanggar dari ketentuan yang berlaku. b) Merancang produk tata ruang terkait pengendalian pemanfaatan fungsi lahan; c) Menerapkan sistem insentif dan disinsentif agar program pengendalian lahan dan

kepentingan ekonomi penduduk dapat berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2018). Data Penggunaan Lahan Kabupaten Badung: Badan Pusat Statistik
- Barlowe. (1986). Land Resources Economic. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Benu, N. M., & Moniaga, V. R. (2016). Dampak Ekonomi dan Sosial Alih Fungsi Lahan Pertanian Hortikultura Menjadi Kawasan Wisata Bukit Rurukan di Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon. *AGRI-SOSIOEKONOMI*, 12(3), 113-124.
- Gao, J., Wei, Y., Chen, W., & Yenneti, K. (2015). Urban land expansion and structural change in the Yangtze River Delta, China. *Sustainability*, 7(8), 10281-10307.
- Ghobadi, G.J. and M.S. Verdian. (2016). The Environmental Effects of Tourism Development in Noushahr. *Journal of Ecology* 6: 529-536.
- Göktuğ, T.H., Yıldız, N.D., Demir, M. and Mestav, B. (2015). Examining the Level of Service in the Context of Recreational Carrying Capacity in the Erzurum Urban Forest, Turkey. *Journal of Environmental Protection*, 6, : 1014-1028.
- Hastuty, S. (2018). Identifikasi Faktor Pendorong Alih Fungsi Lahan Pertanian. *Prosiding*, 3(1). Retrieved from <https://journal.uncp.ac.id/index.php/proceding/article/view/858>
- Iqbal, M., dan Sumaryanto, S. (2016). Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu pada Partisipasi Masyarakat. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 5(2), 167-182.
- Liu, Y. (2018). Introduction to land use and rural sustainability in China. *Land Use Policy*, 74, 1-4.
- Liu, Y., Li, J., and Yang, Y. (2018). Strategic adjustment of land use policy under the economic transformation. *Land use policy*, 74, 5-14.
- Mahardika, B. P., dan Muta'ali, L. (2018). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Terbangun Untuk Industri Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sebagian Wilayah Kecamatan Ceper. *Jurnal Bumi Indonesia*, 7(3).
- Pakasi, C. B., dan Kumaat, R. M. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *AGRI-SOSIOEKONOMI*, 14(2), 151-158.
- Raju, M. S., Udayashankar, N., & Seshadri, S. (2019). Measuring Tourism Carrying Capacity: A Multi-Dimensional Framework for Assessment. In *Environmental Impacts of Tourism in Developing Nations* (pp. 42-67). IGI Global.
- Ruzic, V., and Sutic, B. (2014). Ecological risks of expansive tourist development in protected areas – case study: Plitvice Lakes National Park. *Coll. Antropol.* 38: 241-248.
- Sari, I. M., T. M. Nur, Zurani (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Tambak di Desa Beurawang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen. *Jurnal Sains Pertanian*, 1(2): 134-141.
- Soegijoko, Budi Tjahjati S. dan BS Kusbiantoro ed. (1997). Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia. Bandung. Yayasan Soegijanto-Soegijoko.
- Sumantra, I.K., AA.Putu Agung, AA.K Sudiana, Dera (2018). Development Strategy of Kutuh Village-Badung Coastal Area as a Tourist Object. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 12(11) : 34-37.
- Sumantra, I.K., Anik Yuesti. (2018). Evaluation of Salak Sibtan Agrotourism to Support Community-Based Tourism Using Logic Model.

International Journal of Contemporary Research and Review. 09 (01) 2020: 6-12.

Sumantra, I.K., Anik Yuesti, Sudiana, (2017). Development of Agrotourism to Support Community-Based Tourism toward Sustainable Agriculture. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 11(13) : 93-99.

Sumantra, Ketut. (2017). Strategi mengurangi alih fungsi lahan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Universitas Mahasarakswati Press.